



**RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025**

DISUSUN TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) ini berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugasnya.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dan kami sangat mengharapkan masukan, saran, serta petunjuk dari semua pihak.

Kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.

Sragen, 10 Juli 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sragen



RINA WIJAYA, S.P., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701214 199603 2 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam struktur, sistem sosial, ekonomi dan sikap masyarakat. Pembangunan dilaksanakan melalui proses perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD disusun melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*, serta orientasi substansi secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HTIS) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kebijakan Pemerintah Pusat, dinamika lingkungan strategis yang berkembang dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan tugas penting Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan



yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang lingkungan hidup harus menyusun rencana strategis yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Renstra Dinas Lingkungan Hidup disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Tema pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 berdasarkan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah **“Peningkatan ekonomi melalui peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM dan daya saing pariwisata”**, dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yang diarahkan pada :

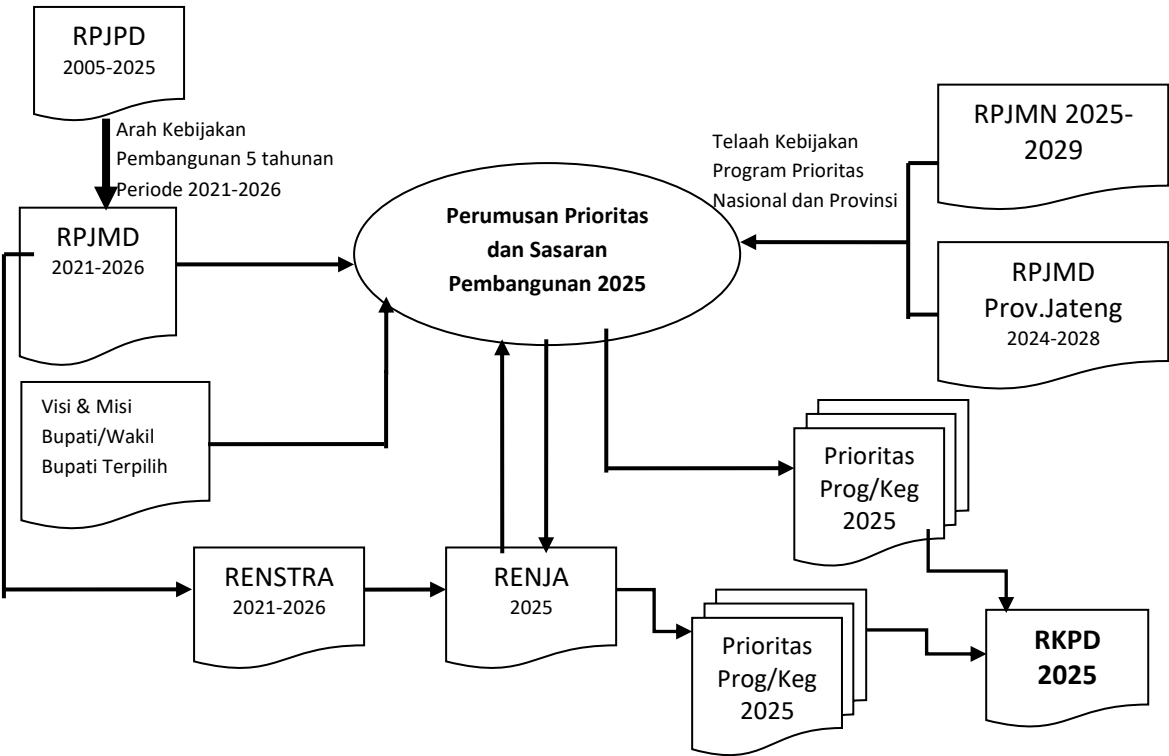
1. Perwujudan kemandirian ekonomi daerah;
2. Perwujudan layanan investasi yang berkualitas;
3. Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah;
5. Penguatan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat;
6. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
7. Perwujudan ketahanan pangan masyarakat;
8. Perwujudan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Renja Tahun 2025 selanjutnya merupakan pedoman umum dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025.



Dalam rangka merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 perlu serangkaian tahapan serta memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yang berlaku dan telah tersedia, di antaranya, review RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 dan Evaluasi RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025, telaah dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2028, telaah RPJMN Tahun 2025-2029, serta memperhatikan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

Secara ringkas alur perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah ditunjukkan pada Gambar 1.



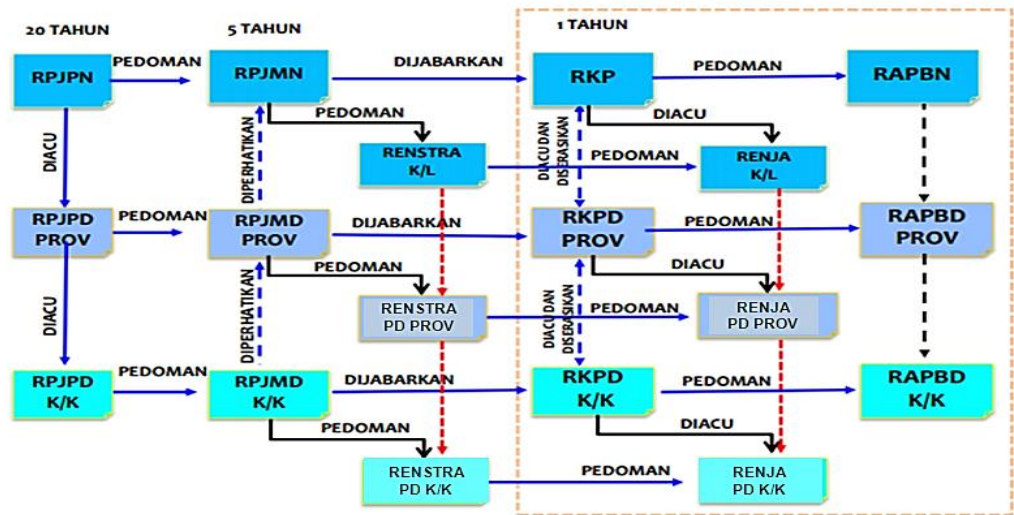
Gambar 1.1 Alur Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 seperti yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah **“Menuju Kabupaten Sragen mandiri, sejahtera dan berbudaya berlandaskan semangat gotong royong”**. Dalam visi tersebut memuat empat pokok pikiran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sragen pada

tahun 2026, yakni **“Mandiri”, “Sejahtera”, “Berbudaya”, dan “Gotong Royong”**. Pokok-pokok mengenai “Mandiri”, “Sejahtera”, dan “Berbudaya” menyiratkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode di tahun 2026. Sedangkan pokok visi “Gotong Royong” memperlihatkan ketentuan mengenai metode atau cara yang berkaitan dengan upaya mencapai ketiga pokok visi yang telah disebutkan sebelumnya.

Misi yang ditempuh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen guna mewujudkan visi tahun 2021-2026 tersebut adalah misi ke (5): **“Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.”**

Hubungan antar dokumen RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2024 menjelaskan hubungan antar dokumen perencanaan, Program Strategis Nasional, Program Strategis Provinsi Jawa Tengah dan dokumen perencanaan kabupaten/kota lainnya, khususnya pembangunan wilayah perbatasan.



Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.2. Dokumen RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. RKPD menjadi pedoman

bagi OPD untuk menyusun Renja OPD. RKPD diserasikan dengan RKPD Provinsi dan RKP melalui forum Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Selain itu, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 juga harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral nasional maupun daerah, antara lain:

- 1) RKP dan RKPD Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
- 3) Standar Pelayanan Minimal;
- 4) *Sustainable Development Goals* (SDGs);
- 5) *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; dan
- 6) Rencana Strategi Nasional Tahun 2020-2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Tahun 2025 adalah dalam rangka penyediaan pedoman umum penyusunan perencanaan tahun 2024 bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dengan tujuan :



1. Perencanaan pembangunan tahun 2024 di Kabupaten Sragen dapat lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan jangka menengah daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dan periode lanjutannya;
2. Pencapaian target pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 dapat lebih terukur dan lebih optimal;
3. Pemanfaatan sumber daya dan sumber dana dapat lebih dioptimalkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang telah disepakati.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah; analisis kinerja pelayanan perangkat daerah; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah; review terhadap rancangan awal RKPD; dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional; tujuan dan sasaran renja perangkat daerah; dan program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan; penjelasan jika rumusan



program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD; dan tabel rencana program dan kegiatan.

BAB V. PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian; kaidah-kaidah pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Kerja Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sragen dapat ditunjukkan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terdiri dari status mutu air, informasi status mutu udara, persampahan, kerentanan perubahan iklim, dan emisi gas rumah kaca. Kemampuan lahan di Kabupaten Sragen diketahui dari hasil *overlay* peta dengan menggunakan peta sekunder skala 1:250.000. Adapun informasi yang tersedia dan digunakan untuk mengetahui daya dukung lahan meliputi bentuk lahan, hidrogeologi (produktivitas akuifer), satuan batuan, bencana, dan penggunaan lahan. Dari hasil analisis yang dilakukan dalam pembuatan daya dukung dan daya tampung lahan di Kabupaten Sragen, maka dapat dibagi menjadi 5 kelas, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Adapun secara lebih detail kemampuan lahan Kabupaten Sragen dapat dilihat pada peta berikut.

Tabel 2.1.1 Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

No	Keterangan	Tahun									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	IKA	N.A	N.A	30,00	70,00	45,00	48,00	50,00	48,75	55,00	50,74
2	IKU	N.A	N.A	98,35	88,11	98,00	84,30	98,50	88,47	98,25	89,84
3	IKTL	N.A	N.A	42,84	24,25	43,00	23,89	50,00	41,15	56,00	43,10
4	IKLH	N.A	N.A	55,64	55,64	58,30	58,30	64,60	63,17	68,40	64,90

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, 2023

Pada tahun 2021, indek IKLH Kabupaten Sragen sudah mampu melampaui target, yaitu 58,30.

Tabel 2.1.2 Usia Pakai dan Tipe Pengelolaan Sampah TPA di Kabupaten Sragen Tahun 2023

No	Kecamatan	Nama TPA	Tipe Pengelolaan Sampah di TPA			Luas (Ha)	Usia TPA s.d. Tahun
			<i>Control Landfill</i>	<i>Unmana ged Shallow</i>	<i>Unmana ged Deep</i>		
1	Gesi	TPASS Tanggan	V	N.A	N.A	4,6	2025

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, 2023

Berdasarkan tabel di atas, TPAS Tanggan memang sudah menerapkan tipe pengelolaan dengan *Control Landfill* dimana pengurugan tanah di zona penimbunan sampah dilaksanakan secara rutin. Air lindi dibuang kesaluran lindi yang dialirkan ke Kolam lindi, dan gas metana sudah dikumpulkan di pipa pembuangan metana. Usia TPAS Tanggan sebenarnya sudah habis pada Tahun 2019, akan tetapi ada perluasan lahan TPAS seluas 0,8 Ha pada Tahun 2022, sehingga dapat memperpanjang usia TPAS sampai dengan Tahun 2025.

Review hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dan realisasi sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan *yang belum memenuhi target* kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
2. Realisasi program/ kegiatan *yang melebihi target* kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pengendalian Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Persampahan dan Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada Program Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah karena anggaran Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, dari 2 (dua) paket bimbingan teknis/pelatihan yang dianggarkan hanya dilaksanakan satu kali pelatihan karena pada tahun 2023 Pemerintah Pusat hanya mengadakan satu kali pelatihan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas adalah untuk kedepannya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen akan lebih intens untuk mencari informasi tentang bimbingan teknis/pelatihan tentang lingkungan hidup.

Pencapaian target kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel 2.1.3



Tabel 2.1.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Sragen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.03.04	PRO GRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Sistem Pengelolaan Persampahan yang tersedia di Kabupaten Sragen	%	100	100	100	100	100	100	100
1.3.04.2.01	Pengembangan Sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota	Jumlah Sistem Sarpras Pengelolaan Persampahan yang terbangun di Kabupaten Sragen	Unit	13	2	2	100	13	13	100
1.3.04.2.01.01	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengelolaan persampahan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	2	2	2	100	2	2	100
1.3.04.2.01.02	supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Membangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	0	0	0	3	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rumah Tangga	500	500	500	0	500	500	100
1.3.04.2.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	Unit	2	0	0	0	2	2	100
1.3.04.2.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rumah Tangga	4000	0	0	0	0	0	0
1.3.04.2.01.06	Penyediaan Sarana persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	Unit	2	0	0	0	2	2	100
1.3.04.2.01.07	Pembinaan Teknik infrastruktur Pengelolaan Persampahan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan	Orang	150	0	0	0	150	150	100
1.3.04.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kelompok	2	0	0	0	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen LH	%	100	100	100	100	100	100	100
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH yang disusun	Dokumen	4	3	6	200	4	4	100
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	3	3	3	100	3	3	100
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	1	1	100
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2 Buah KLHS RDTR (5 Lokasi)	Dokumen	2	0	1	100	2	2	100
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	0	1	200	1	1	100
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	0	0	0	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH	%	100	100	100	100	100	100	100
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sumur resapan, IPA, lubang biopori dan embung yang terbangun dan Pengelolaan Laboratorium	Dokumen	5	3	3	100	5	5	100
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	2	0	0	0	2	2	100
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	3	3	3	100	3	3	100
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pencemaran yang tertangani	%	72	70	70	100	72	72	100
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	1	1	100	1	1	100
2.11.03.2.02.02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Lokasi	1	0	0	0	1	1	100
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	1	0	0	0	1	1	100
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan LH yang ditangani	%	88	85	85	100	88	88	100
2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen	2	2	2	100	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	1	0	0	0	1	1	100
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik yang terpelihara	%	100	100	100	100	100	100	100
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luasan RTH publik yang terpelihara	%	100	100	100	100	100	100	100
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	2	0	0	100	2	2	100
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	2,48	2,48	2,48	100	2,48	2,48	100
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	25,27	25,27	25,27	100	25,27	25,27	100
2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	175	125	125	100	175	175	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	1	1	1	100	1	1	100
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Rekomendasi IPLC dan TPS LB3 yang diterbitkan	%	100	100	0	0	100	100	100
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Permohonan rekomendasi penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan fasilitasi	%	100	0	0	0	100	100	100
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	23	0	0	0	23	23	100
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	15	0	0	0	15	15	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Permohonan rekomendasi pengumpulan limbah B3 yang dilakukan fasilitasi	%	100	100	0	0	100	100	100
2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	10	0	0	1	1	100
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	1	0	0	0	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	%	95	95	95	100	95	95	100
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang belum dan yang memiliki persetujuan lingkungan	%	95	95	145	152,63	95	95	100
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	25	1	1	100	25	25	100
2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Orang	2	1	1	0	2	2	100
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	0	0	0	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Desa dan kelurahan yang menyusun Peraturan Desa dan Kelurahan terkait Lingkungan Hidup	%	20	20	20	100	20	20	100
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa dan kelurahan yang mengikuti Sosialisasi Perundang-undangan Lingkungan Hidup	%	20	20	20	100	20	20	100
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga	30	30	25	83	30	30	100
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi)	%	68	59	59	100	68	68	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten)	%	77,33	68,67	68,67	100	77,33	77,33	100
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	14	13	13	100	14	14	100
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan	%	90	90	90	100	90	90	100
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Aduan Sengketa Lingkungan yang ditindaklanjuti	%	90	90	90	100	90	90	100
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	10	10	8	80	10	10	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (aset pemerintah)	%	48,5	48	48,27	101	48,5	48,5	100
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (pemberdayaan masyarakat)	%	22	21,5	23,54	109	22	22	100
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Ton/Th	120.000	111.000	154.693	139,36	120.000	120.000	100
		Jumlah Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Ton/Th	74.000	63.000	50.710	80,49	74.000	74.000	100
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	dokumen	3	2	2	100	3	3	100
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauren Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauren Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	2	2	2	100	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	120.000	111.000	154.693	139	120.000	120.000	100
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	42	0	0	0	42	42	100
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	4	4	4	100	4	4	100
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	3	0	0	0	3	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.11.2.01.07	Penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	2	1	1	100	2	2	100
2.11.11.2.02	Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Rekomendasi	2	0	0	0	2	2	100
2.11.11.2.02.01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Rekomendasi	2	0	0	0	2	2	100
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Laporan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Laporan	2	0	0	0	2	2	100
2.11.11.2.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Laporan	2	0	0	0	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.11.2.03.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Unit	1	0	0	0	1	1	100
2.11.11.2.03.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan	1	0	0	0	1	1	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan, dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah (bidang perencanaan pengaduan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan bidang pengelolaan persampahan).

Dengan dukungan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan dana yang tersedia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen berupaya untuk menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan. Setiap tahun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen berupaya dapat memenuhi target pelaksanaan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan diarahkan secara maksimal dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan sesuai *RPJMD Kabupaten Sragen dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen*.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 sebagaimana pada Tabel 2.2.1



Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen

Kode	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas LH		Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Capaian Tahun 2024	Catatan Analisis
				2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.03.04	Persentase Sistem Pengelolaan Persampahan yang tersedia di Kabupaten Sragen			100	100	100	100	
1.3.04.2.01	Jumlah Sistem Sarpras Pengelolaan Persampahan yang terbangun di Kabupaten Sragen			13	11	13	11	
1.3.04.2.01.01	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun			2	2	2	2	
1.3.04.2.01.02	Jumlah Konsultasi Supervisi Membangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi			3	0	3	0	
1.3.04.2.01.03	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			500	500	500	500	
1.3.04.2.01.04	Jumlah TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi			2	2	2	2	
1.3.04.2.01.05	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			0	0	0	0	
1.3.04.2.01.06	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan			2	2	2	2	
1.3.04.2.01.07	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan			150	200	150	200	
1.3.04.2.01.08	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			2	2	2	2	
2.11.02	Persentase ketersediaan dokumen LH			100	100	100	100	
2.11.02.2.01	Jumlah dokumen RPPLH yang disusun			4	3	4	3	
2.11.02.2.01.01	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun			3	2	3	2	
2.11.02.2.01.02	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota			1	1	1	1	

Kode	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas LH		Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Capaian Tahun 2024	Catatan Analisis
				2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11.02.2.02	2 Buah KLHS RDTR (5 Lokasi)			2	0	2	0	
2.11.02.2.02.01	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun			1	0	1	1	
2.11.02.2.02.02	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun			1	0	1	0	
2.11.03	Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH			100	100	100	100	
2.11.03.2.01	Jumlah dokumen sumur resapan, IPA, lubang biopori dan embung yang terbangun dan Pengelolaan Laboratorium			5	6	5	6	
2.11.03.2.01.01	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			2	3	2	3	
2.11.03.2.01.02	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			3	3	3	3	
2.11.03.2.01.03	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan			0	0	0	0	
2.11.03.2.02	Persentase pencemaran yang tertangani			72	75	72	75	
2.11.03.2.02.01	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			1	0	1	0	
2.11.03.2.02.02	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi			1	0	1	0	
2.11.03.2.02.03	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan			1	2	1	2	
2.11.03.2.03	Persentase kegiatan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan LH yang ditangani			88	89	88	89	
2.11.03.2.03.02	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar			2	2	2	2	
2.11.03.2.03.04	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi			1	1	1	1	
2.11.04	Persentase luasan RTH publik yang terpelihara			100	100	100	100	
2.11.04.2.01	Persentase luasan RTH publik yang terpelihara			100	100	100	100	
2.11.04.2.01.01	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun			2	2	2	2	
2.11.04.2.01.02	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			2,48	2,48	2,48	2,48	
2.11.04.2.01.04	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			25,27	25,27	25,27	25,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11.04.2.01.06	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			175	175	175	175	
2.11.04.2.01.07	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola			1	1	1	1	
2.11.05	Persentase Rekomendasi IPLC dan TPS LB3 yang diterbitkan			100	100	100	100	
2.11.05.2.01	Persentase Permohonan rekomendasi penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan fasilitasi			100	100	100	100	
2.11.05.2.01.01	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			23	20	23	23	
2.11.05.2.01.02	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3			15	20	15	15	
2.11.05.2.02	Persentase Permohonan rekomendasi pengumpulan limbah B3 yang dilakukan fasilitasi			100	100	100	100	
2.11.05.2.02.01	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			1	10	1	1	
2.11.05.2.02.02	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya			1	10	1	1	
2.11.06	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan			95	95	95	95	
2.11.06.2.01	Persentase Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang belum dan yang memiliki persetujuan lingkungan			95	95	95	95	
2.11.06.2.01.01	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			25	25	25	25	
2.11.06.2.01.02	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			2	2	2	2	
2.11.06.2.01.03	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1	1	1	1	
2.11.06.2.01.04	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD			1	1	1	1	
2.11.08	Persentase Desa dan kelurahan yang menyusun Peraturan Desa dan Kelurahan terkait Lingkungan Hidup			20	20	20	20	
2.11.08.2.01	Persentase desa dan kelurahan yang mengikuti Sosialisasi Perundang-undangan Lingkungan Hidup			20	20	20	20	
2.11.08.2.01.01	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH			30	30	25	30	
2.11.09	Persentase Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi)			68	78	68	78	
2.11.09.2.01	Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten)			77,33	86,67	77,33	86,67	

Kode	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas LH		Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Capaian Tahun 2024	Catatan Analisis
				2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11.08.2.01.01	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH			30	30	30	30	
2.11.09	Persentase Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi)			68	78	68	78	
2.11.09.2.01	Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten)			77,33	86,67	77,33	86,67	
2.11.09.2.01.01	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH			14	15	14	15	
2.11.10	Persentase Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan			90	90	90	90	
2.11.10.2.01	Persentase Aduan Sengketa Lingkungan yang ditindaklanjuti			90	90	90	90	
2.11.10.2.01.01	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani			10	10	10	10	
2.11.11	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (aset pemerintah)			48,5	49	48,5	49	
	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (pemberdayaan masyarakat)			22	22,5	22	22,5	
2.11.11.2.01	Jumlah Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga			120.000	130.000	120.000	130.000	
	Jumlah Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga			74.000	85.000	74.000	85.000	
2.11.11.2.01.01	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan			3	2	3	2	
2.11.11.2.01.02	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali			2	2	2	2	
2.11.11.2.01.03	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			120.000	130.000	120.000	130.000	
2.11.11.2.01.04	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			42	47	42	47	
2.11.11.2.01.05	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada			4	4	4	4	
2.11.11.2.01.06	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan			3	3	3	3	

Kode	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas LH		Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Capaian Tahun 2024	Catatan Analisis
				2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11.11.2.01.07	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			2	2	2	2	
2.11.11.2.02	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi			2	2	2	2	
2.11.11.2.02.01	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi			2	2	2	2	
2.11.11.2.03	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah			2	2	2	2	
2.11.11.2.03.01	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah			2	2	2	2	
2.11.11.2.03.02	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja			1	8	1	8	
2.11.11.2.03.03	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota			1	1	1	1	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perkembangan di tingkat global saat ini semakin meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Tren ini juga terjadi di tingkat daerah dengan memasukkan isu ini sebagai isu strategis bagi daerahnya. Hal ini yang juga terjadi di Kabupaten Sragen dengan menelaah kondisi lingkungan hidup saat ini. Dari data yang ada terkait kualitas lingkungan hidup menunjukkan bahwa Kabupaten Sragen masih memiliki banyak persoalan, salah satunya pencemaran lingkungan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan salah satu indikator kinerja yang mencerminkan tingkat pencemaran lingkungan. Indeks ini dihitung berdasarkan tiga komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Hutan (IKTL).

Berdasarkan dokumen IKLH yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, IKLH Kabupaten Sragen pada Tahun 2023 adalah sebesar 64,90, yaitu berada pada posisi “cukup”. Apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat bukan tidak mungkin dapat menimbulkan ancaman, mulai dari krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Kondisi yang demikian diperparah dengan meningkatnya kasus pencemaran lingkungan baik sebagai akibat makin padatnya penduduk, aktivitas industri, maupun masih rendahnya kesadaran masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sragen dalam hal ini perlu melakukan penanganan secara berkelanjutan. Guna memastikan keberlanjutan dari kualitas lingkungan hidup yang tetap baik.

Terdapat beberapa permasalahan dalam tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen yang perlu mendapat perhatian serius sebagai upaya pencapaian pembangunan yang berkelanjutan yaitu:

1. Masih rendahnya Sistem Pengelolaan Persampahan;
2. Belum optimalnya penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;



3. Masih rendahnya layanan persampahan, belum mencapai semua kecamatan;
4. Semakin parahnya pencemaran Sungai Bengawan Solo yang mengakibatkan menurunnya kualitas air;
5. Belum optimalnya pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
6. Masih rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan;
7. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan;
8. Masih rendahnya persentase Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis Lingkungan Hidup.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana bantuan yang diberikan sehingga tujuan tidak tercapai.
- c. Masyarakat belum melaksanakan pemilahan sampah dari sumbernya.
- d. Masyarakat kurang ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan kebersihan.
- e. Cuaca ekstrim yang mengganggu pertumbuhan tanaman.
- f. Perubahan peraturan atau ketidak konsistenan aturan merupakan tantangan yang memerlukan penyesuaian atau adaptasi yang cepat.
- g. Anggaran yang dapat disediakan daerah belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kegiatan bidang lingkungan hidup dan sampah;
- h. Terbatasnya sarana dan prasarana serta personil laboratorium lingkungan
- i. Kurangnya sosialisasi dan pemantauan kepada dunia usaha dalam pengelolaan limbah
- j. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah
- k. Kurangnya personil fungsional (pengawas lingkungan)



- l. SDM di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen yang masih kurang.
- m. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2019.

Peluang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dalam menghadapi permasalahan dan tantangan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Kewenangan yang semakin besar bagi daerah untuk mengelola lingkungan.
- b. Kesempatan mengalokasikan dan mengajukan formasi kebutuhan pegawai melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- c. Kesempatan bagi pegawai untuk mengikuti pendidikan secara formal maupun non formal, dengan adanya bimbingan teknis dan diklat.
- d. Teknologi informasi yang semakin maju yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- e. Terdapatnya struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi yang jelas.
- f. Kecukupan tersedianya sarana dan prasarana.
- g. Prosedur dan mekanisme kerja cukup.
- h. SDM dan jumlah personil memadai.
- i. Perkembangan Pemukiman yang pesat di Kabupaten Sragen.
- j. Meningkatnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat.

Rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel 2.3



Tabel 2.3.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Sragen

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DLH	Persentase Sistem Pengelolaan Persampahan yang tersedia di Kabupaten Sragen	100%	882.014.155	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DLH	Persentase Sistem Pengelolaan Persampahan yang tersedia di Kabupaten Sragen	100%	882.014.155
1.3.04.2.01	Pengembangan Sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota	DLH	Jumlah Sistem Sarpras Pengelolaan Persampahan yang terbangun di Kabupaten Sragen	11 Unit	882.014.155	Pengembangan Sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota	DLH	Jumlah Sistem Sarpras Pengelolaan Persampahan yang terbangun di Kabupaten Sragen	11 Unit	882.014.155
1.3.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS	Kab. Sragen	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	2500 Rumah Tangga	882.014.155	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS	Kab. Sragen	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	2500 Rumah Tangga	882.014.155
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
02.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100%	12.406.736.348	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100%	12.406.736.348
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DLH	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	10.314.440.308	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DLH	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	10.314.440.308
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/ Bulan	10.314.440.308	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/ Bulan	10.314.440.308
2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	DLH	Jumlah bulan penyediaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 Bulan	21.482.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	DLH	Jumlah bulan penyediaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 Bulan	21.482.000
2.11.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Sragen	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	5.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Sragen	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	5.000.000
2.11.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	DLH	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	16.482.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	DLH	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	16.482.000
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DLH	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	191.896.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DLH	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	191.896.000
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.669.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.669.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.348.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.348.000
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DLH	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.655.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DLH	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.655.000
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DLH	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.955.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DLH	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.955.000
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	109.269.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	109.269.000
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DLH	Jumlah bulan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	12 Bulan	24.306.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DLH	Jumlah bulan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	12 Bulan	24.306.500
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLH	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	24.306.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLH	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	24.306.500
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	DLH	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	365.264.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	DLH	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	365.264.000
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.197.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.197.000
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	83.300.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	83.300.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.430.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.430.000
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DLH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	273.337.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DLH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	273.337.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DLH	Jumlah bulan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.489.347.540	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DLH	Jumlah bulan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.489.347.540
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DLH	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	59 Unit	1.436.814.540	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DLH	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	59 Unit	1.436.814.540
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DLH	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	52.533.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DLH	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	52.533.000
2	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KERJA									
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH	Persentase ketersediaan dokumen LH	100%	219.406.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH	Persentase ketersediaan dokumen LH	100%	219.406.000
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	DLH	Jumlah dokumen RPPLH yang disusun	3 Dokumen	219.406.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	DLH	Jumlah dokumen RPPLH yang disusun	3 Dokumen	219.406.000
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	DLH	Jumlah dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH Kabupaten/kota	3 Dokumen	219.406.000	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	DLH	Jumlah dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH Kabupaten/kota	3 Dokumen	219.406.000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH	Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH	100%	462.038.108	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH	Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH	100%	427.038.108
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	Jumlah dokumen sumur resapan, IPA, lubang biopori dan embung yang terbangun dan Pengelolaan Laboratorium	6 Dokumen	162.524.500	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	Jumlah dokumen sumur resapan, IPA, lubang biopori dan embung yang terbangun dan Pengelolaan Laboratorium	6 Dokumen	162.524.500
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	DLH	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	75.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	DLH	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	75.000.000
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Sragen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	87.524.500	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Sragen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	87.524.500

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	Persentase pencemaran yang tertangani	75%	35.000.000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	Persentase pencemaran yang tertangani	75%	35.000.000
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Sragen	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	35.000.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Sragen	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	35.000.000
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DLH	Persentase kegiatan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan LH yang ditangani	89%	264.513.608	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DLH	Persentase kegiatan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan LH yang ditangani	89%	264.513.608
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan Rehabilitasi	DLH	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Ha	65.000.000	Pelaksanaan Rehabilitasi	DLH	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Ha	65.000.000
2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	DLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	2 Dokumen	199.513.608	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	DLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	2 Dokumen	199.513.608
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DLH	Persentase luasan RTH publik yang terpelihara	100%	377.314.928	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DLH	Persentase luasan RTH publik yang terpelihara	100%	377.314.928
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	Persentase luasan RTH publik yang terpelihara	100%	377.314.928	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	Persentase luasan RTH publik yang terpelihara	100%	377.314.928

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Sragen	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	25,27 Ha	238.928.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Sragen	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	25,27 Ha	238.928.000
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Sragen	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	138.386.928	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Sragen	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	138.386.928
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DLH	Persentase Rekomendasi IPLC dan TPS LB3 yang diterbitkan	100%	126.329.800	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DLH	Persentase Rekomendasi IPLC dan TPS LB3 yang diterbitkan	100%	126.329.800
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	DLH	Persentase Permohonan rekomendasi penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan fasilitasi	100%	26.329.600	Penyimpanan Sementara Limbah B3	DLH	Persentase Permohonan rekomendasi penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan fasilitasi	100%	26.329.600
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Sragen	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	20 Laporan	26.329.600	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Sragen	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	20 Laporan	26.329.600
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DLH	Persentase Permohonan rekomendasi pengumpulan limbah B3 yang dilakukan fasilitasi	100%	100.000.200	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DLH	Persentase Permohonan rekomendasi pengumpulan limbah B3 yang dilakukan fasilitasi	100%	100.000.200

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan,Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	DLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	10 Dokumen	100.000.200	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan,Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	DLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	10 Dokumen	100.000.200
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DLH	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	95%	142.341.150	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DLH	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	95%	142.341.150
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DLH	Persentase Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang belum dan yang memiliki persetujuan lingkungan	95%	142.341.150	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DLH	Persentase Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang belum dan yang memiliki persetujuan lingkungan	95%	142.341.150
2.11.06.2.01.07	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	DLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2 Orang	36.500.000	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	DLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2 Orang	36.500.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.06.2.01.05	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLH	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	70 Badan Usaha	105.841.150	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLH	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	70 Badan Usaha	105.841.150
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLH	Persentase Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi)	78%	123.749.900	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLH	Persentase Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi)	78%	123.749.900
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DLH	Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten)	86,70%	123.749.900	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DLH	Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten)	86,70%	123.749.900
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	15 Entitas	123.749.900	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	15 Entitas	123.749.900

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH	Persentase Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan	90%	17.672.800	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH	Persentase Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan	90%	17.672.800
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	DLH	Persentase Aduan Sengketa Lingkungan yang ditindaklanjuti	90%	17.672.800	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	DLH	Persentase Aduan Sengketa Lingkungan yang ditindaklanjuti	90%	17.672.800
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	DLH	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	10 Dokumen	17.672.800	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	DLH	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	10 Dokumen	17.672.800
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (aset pemerintah)	49,0%	#####	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (aset pemerintah)	49,0%	1.782.857.350
		DLH	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (pemberdayaan masyarakat)	22,5%			DLH	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (pemberdayaan masyarakat)	22,5%	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	DLH	Jumlah Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	130000 Ton/Th	#####	Pengelolaan Sampah	DLH	Jumlah Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	130000 Ton/Th	1.732.857.350
		DLH	Jumlah Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	85000 Ton/Th			DLH	Jumlah Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	85000 Ton/Th	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	DLH	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	47 Kelompok	124.796.000	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	DLH	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	47 Kelompok	124.796.000
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	DLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	4 Dokumen	17.923.350	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	DLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	4 Dokumen	17.923.350
2.11.11.2.01.07	Penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	583.988.000	Penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	49.252.000
2.11.11.2.01.001 9	Pengurangan sampah melalui pendaur ulang sampah	Kab. Sragen	Jumlah sampah yang terdaur ulang	2 Ton	5.082.000	Pengurangan sampah melalui pendaur ulang sampah	Kab. Sragen	Jumlah sampah yang terdaur ulang	2 Ton	5.082.000
2.11.11.2.01.002 0	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Sragen	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	130000 Ton	1.535.804.000	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Sragen	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	130000 Ton	1.535.804.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	DLH	Jumlah Laporan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	2 Laporan	50.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	DLH	Jumlah Laporan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	2 Laporan	50.000.000
2.11.11.2.03.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	DLH	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	1 Unit	50.000.000	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	DLH	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	1 Unit	50.000.000
					16.540.460.539					

2.1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Evaluasi pelaksanaan Renja dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan perencanaan program dengan membuat persentase realisasi pelaksanaan program dengan rencana program yang telah disusun tahun lalu. Evaluasi ini bertujuan agar penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih baik dari tahun sebelumnya serta untuk menentukan kegiatan yang seharusnya menjadi prioritas.

Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 pada umumnya telah dilaksanakan dan realisasi program/kegiatan telah tercapai sesuai target kinerja. Terhadap masing-masing program telah dievaluasi dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi maupun catatan indikatornya. Untuk capaian kinerja tahun berjalan yaitu tahun 2025 kami perkirakan pelaksanaan program/kegiatan akan sesuai dengan target rencana.

Uraian mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 dan perkiraan pencapaian kinerja tahun 2024 serta capaian kinerja dalam Renstra periode 2021-2026.

Untuk program/kegiatan administrasi serta dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan fungsi perangkat daerah, pelaksanaannya rutin dan penyelesaiannya 100% pada setiap akhir tahun. Sampai dengan tahun 2024 kinerja rutin ini dapat tercukupi dengan anggaran yang ditargetkan.

Untuk beberapa kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan fungsi perangkat daerah, pelaksanaan dan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan dalam satu tahun berjalan, yaitu tahun 2024. Beberapa kegiatan ini memang tidak setiap tahun dilaksanakan, disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dan adanya kewajiban untuk mendukung program-program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Uraian	Catatan
1	2	3	4	5	6
11	Pelaksanaan Rehabilitasi	Mojomulyo RT01 RW08 , Kab. Sragen	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	pengadaan bibit tanaman penghijauan	Dipindahkan ke Kecamatan Sragen
12	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	RT.05 / RW.16 Tegalsari , Kab. Sragen	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Tong Sampah Pemilah	Dipindahkan ke Kecamatan Sragen
13	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Sidomulyo RT 51 RW 15, Kab. Sragen	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Tong Sampah Pemilah	Dipindahkan ke Kecamatan Sragen
14	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa Gondang, Kab. Sragen	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) desa	Tidak ada anggaran
15	Pelaksanaan Rehabilitasi	Desa Kaliwedi, Kab. Sragen	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	pengadaan bibit tanaman penghijauan	Tidak ada anggaran
16	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa Kaliwedi, Kab. Sragen	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Tong Sampah Pemilah	Tidak ada anggaran
17	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kemetiran Desa Nganti Gemolong, Kab. Sragen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Pembuatan Sumur Resapan	Dipindahkan ke DPU
18	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dukuh Ngablak, Kab. Sragen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Instalasi penampung air	Dipindahkan ke DPU
19	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Lapangan Desa Bendungan, Kab. Sragen	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) desa	Tidak ada anggaran

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, **kebijakan pembangunan nasional** tertuang dalam dokumen RPJMN periode 2020-2024, diantaranya meliputi :

1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur menghubungkan kawasan industri kecil, ekonomi pariwisata, persawahan, perkebunan, tambak perikanan;
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah dan mengurangi *stunting*, kematian ibu dan kematian bayi;
3. Mengundang investasi yang seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas hambatan investasi, perijinan yang lambat dan pungil;
4. Mereformasi birokrasi, reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin *simple*, semakin lincah, mengubah *mindset*, kecepatan melayani, kecepatan memberi izin; dan
5. Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian terdapat 5 (lima) agenda prioritas pembangunan nasional yaitu;

1. Pembangunan infrastruktur
2. Pembangunan SDM
3. Mendorong investasi
4. Reformasi birokrasi
5. Penggunaan APBN

Kelima agenda prioritas tersebut kemudian diterjemahkan kembali ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 terdiri dari:



1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 adalah :
“Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”.

Misi Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi dan ketahanan pangan;
4. Menangani kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja;
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.

Sesuai tupoksinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen melaksanakan Misi kelima yaitu **Misi (5) : “Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.”**

Pelaksanaan misi (5) dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, yaitu:

Tujuan : “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup”

Sasaran : “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”

Perumusan tujuan dan sasaran Renja tahun 2023 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.

Tujuan dan sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dapat dilihat dalam Tabel 3.1 dibawah ini

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kepentingan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	65,25
			Indeks Kualitas Air	Nilai	51,05
			Indeks Kualitas Udara	Nilai	90,25
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	43,40
			Pengelolaan Sampah	Nilai	72,50
		Sasaran Penunjang: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat kinerja SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP	BB (70,60)

Target tujuan dan sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen pada Renja 2025, terdapat perubahan formulasi penghitungan Indikator Kinerja Utama dan penurunan target yang lebih kecil dari target Renstra 2021-2026.

Perubahan formulasi penghitungan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2



Perubahan Formulasi Penghitungan Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidp Kabupaten Sragen

PARAMETER	LAMA	BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
Indeks Kualitas Air (IKA)	0,3 x IKA	(0.376 x IKA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Udara (IKU)	0,3 x IKU	(0.405 x IKU)	
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	0,4 x IKTL	(0.219 x IKL)	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	(0,3 x IKA) + (0,3 x IKU) + (0,4 x IKTL)	(0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)	

Penurunan target Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Target Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
RENSTRA Tahun 2021-2026 dan RENJA Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target RESTRA Tahun 2021-2026	Target RENJA Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,50	65,25
			Indeks Kualitas Air	Nilai	60,00	51,05
			Indeks Kualitas Udara	Nilai	98,40	90,25
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	60,00	43,40
			Pengelolaan Sampah	Nilai	72,50	72,50
		Sasaran Penunjang: Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat kinerja SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP	BB (70,60)	BB (70,60)

Penjelasan penurunan target tujuan dan sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen pada Renja 2025 dibandingkan dengan target Renstra 2021-2026 adalah karena:

- a. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen selama 3 (tiga) tahun terakhir tidak dapat memenuhi angka yang ditargetkan meskipun secara nilai angka mengalami kenaikan;
- b. Jika disandingkan dengan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, angka target Kabupaten Sragen terlalu tinggi (berdasarkan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun rincian program dan kegiatan serta total kebutuhan dana pagu indikatif seperti dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Progam dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Sragen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Sistem Pengelolaan Persampahan yang tersedia di Kabupaten Sragen	DLH	100%	882.014.155	DAU		100%	199.490.750
1.3.04.2.01	Pengembangan Sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota	Jumlah Sistem Sarpras Pengelolaan Persampahan yang terbangun di Kabupaten Sragen	DLH	11 Unit	882.014.155	DAU		11 Unit	199.490.750
1.3.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang ditingkatkan	Kab. Sragen	2500 Rumah Tangga	882.014.155	DAU		2000 Rumah Tangga	199.490.750

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
02.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah		100%	12.406.736.348	DAU		100%	12.547.640.866
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	DLH	14 Bulan	10.314.440.308	DAU		14 Bulan	9.837.703.966
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DLH	125 Orang/Bulan	10.314.440.308	DAU		125 Orang/Bulan	9.837.703.966
2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	DLH	12 Bulan	21.482.000	DAU		12 Bulan	40.155.900
2.11.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sragen	1 Laporan	5.000.000	DAU		1 Laporan	28.041.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.01 .2.04.0 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaat an Barang Milik Daerah SKPD	DLH	1 Dokumen	16.482.000	DAU		1 Dokumen	12.114.900
2.11.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyedia an Administ rasi Umum Perangka t Daerah	DLH	12 Bulan	191.896.000	DAU		12 Bulan	182.031.000
2.11.01 .2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediaka n	DLH	1 Paket	4.669.000	DAU		1 Paket	8.104.000
2.11.01 .2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n	DLH	1 Paket	30.348.000	DAU		1 Paket	35.972.000
2.11.01 .2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n	DLH	1 Paket	34.655.000	DAU		1 Paket	30.000.000
2.11.01 .2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediaka n	DLH	2 Paket	12.955.000	DAU		2 Paket	12.955.000
2.11.01 .2.06.0 9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinas i dan Konsultasi SKPD	DLH	1 Laporan	109.269.000	DAU		1 Laporan	95.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Perangka t Daerah	DLH	12 Bulan	24.306.500	DAU		12 Bulan	39.500.000
2.11.01 .2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka n	DLH	2 Unit	24.306.500	DAU		2 Unit	39.500.000
2.11.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Jumlah bulan Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	DLH	12 Bulan	365.264.000	DAU		12 Bulan	382.612.000
2.11.01 .2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	DLH	1 Laporan	1.197.000	DAU		1 Laporan	2.342.000
2.11.01 .2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n	DLH	1 Laporan	83.300.000	DAU		1 Laporan	65.000.000
2.11.01 .2.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n	DLH	1 Laporan	7.430.000	DAU		1 Laporan	8.770.000
2.11.01 .2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n	DLH	1 Laporan	273.337.000	DAU		1 Laporan	306.500.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.01.2.09.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DLH	12 Bulan	1.489.347.540	DAU		12 Bulan	2.065.638.000
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DLH	59 Unit	1.436.814.540	DAU		59 Unit	1.925.138.000
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DLH	2 Unit	52.533.000	DAU		2 Unit	-
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KERJA								
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen LH	DLH	100%	219.406.000	DAU		100%	275.000.000
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH yang disusun	DLH	3 Dokumen	219.406.000	DAU		3 Dokumen	170.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.02 .2.01.06	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH Kabupaten/Kota	DLH	3 Dokumen	219.406.000	DAU		2 Dokumen	170.000.000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH	DLH	100%	462.038.108	DAU/DAK		100%	731.847.750
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sumur resapan, IPA, lubang biopori dan embung	Kab. Sragen	6 Dokumen	162.524.500	DAU		6 Dokumen	351.441.800
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	DLH	3 Dokumen	75.000.000	DAU		3 Dokumen	75.000.000
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Sragen	3 Dokumen	87.524.500	DAU		3 Dokumen	276.441.800



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase pencemaran yang tertangani	Kab. Sragen	75%	35.000.000	DAU		75%	30.005.000
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten /Kota yang Dilaksanakan	Kab. Sragen	Laporan	35.000.000	DAU		1 Titik	80.021.500
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase kegiatan pemulihn pencemaran dan/ atau kerusakan LH yang ditangani	DLH	89%	264.513.608	DAU		90%	350.400.950
2.11.03.2.03.009	Pelaksanaan rehabilitasi	Luas Area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten /kota yang menjadi kewenangan kabupaten /kota	DLH	1 Ha	65.000.000	DAU		1 Dokumen	147.430.900
2.11.03.2.03.012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	DLH	2 Dokumen	199.513.608	DAU		2 Dokumen	202.970.050



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi- atan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik yang terpelihara	DLH	100%	377.314.328	DAU		100%	454.251.200
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luasan RTH publik yang terpelihara	Kab. Sragen	100%	377.314.328	DAU		100%	454.251.200
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	25,27 Ha	238.928.000	DAU		25,27 Ha	260.000.000
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Kab. Sragen	1 Unit	138.386.328	DAU		1 Unit	70.000.000
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Rekomendasi IPLC dan TPS LB3 yang diterbitkan	DLH	100%	126.329.800	DAU		100%	20.000.000
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Permohonan rekomendasi penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan fasilitasi	DLH	100%	26.329.600	DAU		100%	20.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.05 .2.01.0 2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kab. Sragen	20 Laporan	26.329.600	DAU		20 Laporan	20.000.000
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Permohonan rekomendasi pengumpulan limbah B3 yang dilakukan fasilitasi	DLH	100%	100.000.200	DAU		100%	-
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta	DLH	10 Dokumen	100.000.200	DAU		10 Dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNG AN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkung an	DLH	95%	142.341.150	DAU		95%	85.000.000
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang belum dan yang memiliki persetujuan lingkung an	DLH	95%	142.341.150	DAU		95%	85.000.000
2.11.06.2.01.07	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	DLH	2 Orang	36.500.000	DAU		0 Orang	-
2.11.06.2.01.09	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	DLH	70 Badan Usaha	105.841.150	DAU		1 Dokumen	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi)	DLH	78%	123.749.900	DAU		89%	150.000.000
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten)	DLH	86,70%	123.749.900	DAU		96,67%	150.000.000
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	DLH	15 Entitas	123.749.900	DAU		16 Entitas	150.000.000
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan	DLH	90%	17.672.800	DAU		90%	20.000.000
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase Aduan Sengketa Lingkungan yang ditindaklanjuti	DLH	90%	17.672.800	DAU		90%	20.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.10 .2.01.0 004	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten /Kota yang Ditindakla njuti/Dita ngani	DLH	10 Dokumen	17.672.800	DAU		10 Dokumen	20.000.000
2.11.1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (aset pemerintah)	DLH	49,0%	1.782.857.350	DAU		49,5%	3.955.711.250
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (pember dayaan masyarakat)	DLH	22,5%				23,0%	
2.11.1 1.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	DLH	130000 Ton/Th	1.732.857.350	DAU		140000 Ton/Th	3.955.711.250
		Jumlah Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	DLH	85000 Ton/Th				96000 Ton/Th	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi- atan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.11 .2.01.0 4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaa n Sampah Berbasis Masyaraka t	DLH	47 Kelompok	124.796.000	DAU		50 Kelompok	23.880.750
2.11.11 .2.01.0 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinas i dan Sinkronisa si Penyediaa n Prasarana dan Sarana Bersama Pemerinta h Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten /Kota untuk Pengelolaa n Sampah Kabupaten /Kota. Pengelolaa n Persampa han Sesuai dengan Rencana Induk	DLH	4 Dokumen	17.923.350	DAU		4 Dokumen	194.859.000
2.11.11 .2.01.0 7	Penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penangana n Sampah untuk Kegiatan Pemilahan , Pengumpu lan, Pengangku tan, Pengolaha n, dan Pemrosesa n Akhir	Kab. Sragen	1 Unit	49.252.000	DAU		1 Unit	1.634.694.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.06 .2.01.0	Pengawasan Usaha	Jumlah Laporan	DLH	1 Laporan		DAU		1 Laporan	85.000.000
2.11.11 .2.01.0 019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Kab. Sragen	2 Ton	5.082.000				
2.11.11 .2.01.0 020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten /kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Sragen	130000 Ton	1.535.804.000				
2.11.11 1.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	DLH	2 Laporan	50.000.000	DAU		2 Laporan	-
2.11.11 .2.03.0 2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/ Swasta/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	DLH	1 Unit	50.000.000	DAU		1 Unit	-
					16.540.460.539				18.438.941.816

Anggaran untuk mendanai program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen berasal dari APBD (DAU). Usulan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen terlampir. Total kebutuhan dana pagu indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.16.540.460.539,00**



Adapun untuk target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen sebesar **Rp.600.000.000,00** terdiri dari:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| a. Retribusi Persampahan/Kebersihan | Rp.589.102.450,00 |
| b. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus | |
| Parkir Diluar Badan Jalan | Rp. 5.000.000,00 |
| c. Hasil Sewa PMD | Rp. 5.000.000,00 |

dengan analisa sebagai berikut:

a. Retribusi Persampahan/Kebersihan

1. Optimalisasi pemahaman masyarakat terkait dengan retribusi persampahan/kebersihan antara pelayanan langsung dan tidak langsung;
2. Pembayaran retribusi persampahan/kebersihan melalui agen-agen yang ada di kelurahan atau langsung dapat membayar di bank mempermudah masyarakat untuk membayar retribusi persampahan;
3. Sebagaimana masyarakat mau membayar retribusi persampahan/kebersihan apabila ada pelayanan pengangkutan sampah dari rumah oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen;
4. Potensi wajib retribusi belum tereksplorasi semua karena keterbatasan sumber daya manusia penarik/juru pungut retribusi;
5. Belum dilaksanakan Peraturan Daerah nomor I tahun 2019 mengenai Retribusi Jasa Umum secara optimal;
6. Belum adanya reward dan punishment bagi obyek wajib retribusi persampahan/kebersihan;
7. Pada Tahun 2024 ada perubahan Perda Pajak dan Retribusi persampahan/kebersihan dimana retribusi persampahan/kebersihan ada kenaikan tetapi tidak signifikan dikarenakan sebagian besar pelayanan persampahan dari sumber melalui pihak ketiga (Paguyuban Lingkungan Asri).

b. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar badan Jalan

Optimalisasi pemanfaatan aset Pemerintah Daerah Hutan Kota Harmoni Hijau yang berada di Kelurahan Plumbungan Kecamatan Karangmalang mulai tahun 2023 diberlakukan penarikan parkir untuk pengunjung;

c. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar badan Jalan



Optimalisasi pemanfaatan aset Pemerintah Daerah Hutan Kota Harmoni Hijau yang berada di Kelurahan Plumbungan Kecamatan Karangmalang dan Hutan Kota Karangtengah Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sragen mulai tahun 2023 diberlakukan penarikan sewa lapak pedagang.



BAB V

PENUTUP

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan kewajiban yang harus disusun sebagai tolok ukur pencegahan dan penanganan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Sragen. Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) merupakan kebijakan dan strategi pengurangan sampah rumah tangga dan penanganan sampah rumah tangga di Kabupaten/Kota. Dokumen Jakstrada persampahan wajib disusun masing-masing Kabupaten/Kota. Sehingga perlu sinergi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sragen dengan OPD terkait.

Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2021-2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026. Jika dalam perjalanan waktu terdapat revisi karena adanya prioritas kegiatan, keterbatasan dana, dan kebijakan kepala daerah maka kegiatan tersebut masih mungkin berubah. Namun demikian, dibutuhkan komitmen kuat dari segenap jajaran pimpinan dan staf Dinas Lingkungan Hidup untuk mengupayakan realisasinya pada tahun rencana karena keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup ditentukan oleh hal tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah tanggung jawab seluruh bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen. Oleh karena itu, perencanaan yang terarah dan terpadu merupakan modal yang sangat penting menuju keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.



c. Rencana tindak lanjut

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen akan merencanakan kegiatan-kegiatan untuk menindaklanjuti permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian target lingkungan hidup sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan melalui pemberdayaan masyarakat serta penegakan hukum kepada pelaku kegiatan terkait penataan perizinan dan/atau prosedur pengelolaan limbah baik cair, udara atau padat;
- 2) Pemenuhan sarana prasarana pengelolaan sampah dari sumbernya baik secara kuantitas maupun kualitas yang berupa pemilah sampah, pengumpul sementara sampah, armada angkut sampah dan peralatan pengolah sampah;
- 3) Penyediaan anggaran yang memadai;
- 4) Pemenuhan Standar Operasional Prosedur yang tetap;
- 5) Penyusunan peraturan/ketentuan perlindungan lahan dan peningkatan pengawasan penegakan hukum terkait alih fungsi lahan yang terintegrasi dalam proses persetujuan lingkungan;
- 6) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup demi terwujudnya Kabupaten Sragen yang bersih, teduh dan berkelanjutan.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sragen.

Sragen, 10 Juli 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sragen



RINA WIJAYA, S.P., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701214 199603 2 005